

SUPERVISI DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH

Imran Siregar

Abstract

In the learning process in madrasah, a supervisor has an important role in achieving the learning objective. He is a partner, consultant, and an evaluator as well. Consequently, the madrasah supervisor has to have wider knowledge and experience for carrying his task and responsibilities.

This research tries to describe how the madrasah's supervisor carries his task and responsibility in teaching-learning process.

The research finds out that the role of madrasah supervisor—whether as partner, consultant, or evaluator—has not fully been functional. This condition is dominantly caused by the knowledge, experience, and training background of the supervisor which is mostly irrelevant to his job. Another factor is related to the age of supervisor which is approximately near to 60 years, that become a constraint to actively encourage his quality improvement.

Lahir di Tapanuli Selatan, 25 Juni 1956.
Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1983.
Saat ini sedang menyelesaikan Tesis S2 di Univ. Negeri Jakarta. Lulusan terbaik Diklatpim III Angkatan XVII Tahun 2007.
Ahli Peneliti Muda/Kabid.
Penyelenggaraan Penelitian pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

Keywords: *supervision, supervisor, teaching-learning, madrasah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma pengelolaan pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, dari yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis. Perubahan ini sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi telah mendorong untuk dilanjutkannya proses restrukturisasi, refungsionalisasi, serta revitalisasi organisasi dan manajemen pendidikan. Proses tersebut perlu dilakukan agar pengelola pendidikan lebih mampu melayani dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Keadaan semacam itu menimbulkan implikasi para pengelola pendidikan pada tingkat makro, meso, maupun mikro dituntut untuk mampu menyajikan program pendidikan secara menyeluruh, terintegrasi, bertahap, berkelanjutan, akuntabel, partisipatif, dan antisipatif terhadap berbagai perubahan.

Desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol

dari pusat. Proses pendidikan bukan suatu mesin yang apabila tombol sudah ditekan, maka proses akan berjalan secara teratur sebagaimana telah diprogramkan. Pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi antara berbagai *input* yang ada dan *input* dengan lingkungan. Oleh karena interaksi yang ada dan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain, maka keseragaman secara menyeluruh yang diinstruksikan dari pusat tidak akan pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan kata lain, kebijakan desentralisasi dapat mengoptimalkan proses pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, desentralisasi pendidikan juga dapat berarti pemegang kendali pendidikan di tingkat bawah akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan improvisasi dalam melaksanakan pendidikan. Dengan demikian akan terdapat upaya terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan adalah pengawas. Kondisi yang seringkali terjadi adalah anggapan bahwa keberadaan pengawas membuat madrasah tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa. Salah satu faktor penyebabnya

adalah kompetensi yang dimiliki pengawas tersebut. Seringkali muncul kesan di masyarakat pendidikan, bahwa profesi atau jabatan fungsional merupakan pilihan para mantan pejabat untuk memperpanjang masa dinas sebagai PNS. Jaelani (2003), menyebutkan bahwa pengawas yang berasal dari pejabat struktural cenderung kurang memahami teknis kependidikan. Argumentasi tersebut diperkuat oleh kajian dari Tim Ditjen Bagais (2003) tentang kinerja pengawas dari dilihat dari prespektif, yang menemukan bahwa: (1) pengawas jarang melakukan kunjungan, (2) guru dan kepala madrasah cenderung dianggap sebagai bawahan, (3) minimnya kemampuan teknis edukatif pendidikan, dan (4) banyak pengawas yang memiliki basis ilmu pendidikan.

Temuan-temuan di atas pada gilirannya akan menimbulkan implikasi negatif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam maupun pendidikan di madrasah. Tugas pokok seorang pengawas adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan (Ditjen Dikdasmen, 1998). Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil kinerja sekolah yang antara lain tampak pada tingkat ketercapaian kompetensi

(rangkaiian kemampuan) siswa. Dalam konteks ini berarti seorang pengawas harus mengetahui konsep dan teknik penilaian agar dapat mengetahui kinerja madrasah. Instrumen penilaian itu harus memenuhi prinsip validitas (kesahihan) dan reliabilitas (kehandalan). Apabila instrumen yang digunakan tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah data yang diperoleh dari kegiatan penilaian bukanlah data yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pengawas juga bertugas membina penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya melakukan pembinaan itu, seorang pengawas harus memahami adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan pendekatan MBS. MBS merupakan salah satu alternatif pendekatan dalam mengelola pendidikan yang difokuskan pada pemberian otonomi yang lebih luas pada madrasah untuk mengelola dirinya sendiri. Sasarannya adalah peningkatan mutu madrasah. Pendekatan ini mengharuskan seorang pengawas memposisikan diri sebagai pembina, pelayan, penilai, dan pemberi bantuan kepada sekolah terutama para tenaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Efektivitas kerja dari seorang pengawas antara lain tampak pada kemampu-

annya memberikan layanan supervisi kepada madrasah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas supervisi dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di madrasah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses supervisi yang dilakukan pengawas
2. Bagaimana penilaian kepala madrasah terhadap kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas madrasah
3. Bagaimana penilaian guru terhadap kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas madrasah?

C. Kerangka Teori

1. Supervisi

Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris dari kata *Super* dan *Vision*. *Super* berarti lebih atau atas, dan *vision* adalah melihat. Dengan demikian supervisi berarti melihat dari atas, mengamati, atau memantau sesuatu (O'Donnel, 1995). Dengan demikian, supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai proses melihat/meninjau pendidikan secara lebih. Secara terminologis, supervisi

pendidikan sebagai proses yang digunakan personalia pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pendidikan melalui bantuan terhadap personalia lain. (Bafadal, 1992). Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses manajemen pendidikan yang terutama diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja personalia sekolah/madrasah. Dalam konteks pembelajaran, supervisi adalah proses pembimbingan kepada guru dan tenaga kependidikan lain yang menangani siswa untuk memperbaiki situasi mengajar sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan menghasilkan prestasi yang optimal.

Menurut Sergiovanni dan Starrat (1993), supervisi adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran. Supervisi pendidikan, dengan demikian merupakan pelayanan yang berorientasi kepada pengajaran dan usaha-usaha perbaikannya. Kegiatan supervisi diarahkan kepada usaha pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti guru, murid, kurikulum, alat dan buku-buku pengajaran serta kondisi lingkungan sosial fisik yang mempengaruhi proses

belajar mengajar. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam proses pemberian supervisi adalah didasarkan pada data yang lengkap, tepat, akurat, rinci dan harus benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Melalui supervisi guru diharapkan bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan bagi murid yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, pada dasarnya supervisi merupakan pelayanan atau bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan atau pelayanan profesional yang dimaksud adalah segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan bantuan, dorongan dan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan tugas utamanya dengan lebih baik, yaitu memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu hasil belajar mengajar.

2. Pembelajaran

Menurut Heinich et. al. (1996) pembelajaran merupakan proses pengembangan pengetahuan baru, keterampilan atau sikap sebagai hasil dari suatu interaksi timbal balik siswa dengan informasi dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran bermuara pada perubahan tingkah laku siswa dalam tiga dimensi yaitu: kognitif, afektif dan psikomotor.

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya peningkatan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Oleh karena itu, dalam pembelajaran seorang guru harus memahami hakikat materi pelajaran yang diajarkannya sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan dapat memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar. Menurut Sagala (2005), pembelajaran memiliki dua karakteristik. *Pertama*, proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara optimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. *Kedua*, dalam pembelajaran dibangun suasana dialogis dan proses tanya jawab secara terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir tersebut itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.

D. Metodologi

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di empat propinsi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Nopember 2007.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode survei. Penggunaan metode ini memberi keleluasaan kepada peneliti untuk memperoleh temuan-temuan studi berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sevilla et al. (1988) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode survei, peneliti dapat mentabulasi objek-objek nyata atau mengukur hal-hal yang tidak nyata seperti pendapat atau pencapaian prestasi tertentu. Menurut Kerlinger (1990) ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk suatu studi/penelitian yang menggunakan pendekatan sur-

vei, yaitu: (1) perumusan masalah, (2) penentuan sampel dan rencana sampling, (3) penyusunan instrumen, (4) pengumpulan data, (5) analisis data, dan (6) pelaporan.

3. Populasi dan Sampling

Populasi sasaran penelitian pengawas madrasah di empat propinsi. Sampel penelitian sejumlah 40 orang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, dari setiap propinsi, diambil 10 orang pengawas. Di samping itu, diambil informan yang menjadi sumber data bersifat kuantitatif, yaitu: kepala madrasah dan guru, dan Kasi Mapenda Setiap wilayah yang terpilih, diambil 7 (tujuh) MTs dan 7 (tujuh) MI. Dari setiap madrasah diambil kepala madrasah dan 2 (dua) orang guru sebagai informan. Dengan demikian komposisi anggota sampel dan informan sbb:

Tabel 1: Komposisi Anggota Sampel

Propinsi	Sampel (pengawas)	Informan				Jumlah
		Ka MI	Guru MI	Ka MTs	Guru MTs	
Jateng	10	7	14	7	14	52
Jatim	10	7	14	7	14	52
DIY	10	7	14	7	14	52
NTB	10	7	14	7	14	52
Jml	40	28	56	28	56	208

4. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi ini terdiri dari: kuesioner dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: pengisian kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk menjangkau data kuantitatif tentang penilaian atau persepsi terhadap kegiatan supervisi dalam peningkatan mutu pembelajaran madrasah berdasarkan jawaban butir-butir instrumen. Responden mengisi kuesioner antara lain: kepala madrasah, guru dan Kepala/staf Mapenda Kandepag.

Teknik wawancara digunakan untuk menjangkau data kualitatif tentang kebutuhan, minat, opini, harapan, masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Wawancara terutama untuk menjangkau data komponen proses. Wawancara juga digunakan untuk mengecek data lain yang sudah lebih dahulu diperoleh.

5. Validasi Instrumen

Validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dengan teknik ini berhubungan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkan-

dung dalam materi yang diukurnya. Dalam studi ini, validitas yang dilakukan adalah validitas konsep yang melibatkan ahli di bidang pendidikan madrasah dan metodologi penelitian.

6. Analisis data

Analisis data penelitian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif (*mixed approach*). Hal ini dilakukan karena ada instrumen-instrumen yang bersifat kuantitatif berupa angket dan angket instrumen yang bersifat kualitatif seperti daftar pertanyaan terbuka. Pada tahap awal angket yang disusun akan dikuantifikasi dan ditabulasikan. Selanjutnya data kuantitatif akan diperkaya dengan data kualitatif, agar penelitian ini dapat menemukan alasan-alasan atau proses dari suatu kegiatan dari obyek yang diteliti. Penggunaan teknik semacam ini oleh Supriadi (2003) disebut sebagai prespektif inklusif dalam penelitian.

II. HASIL PENELITIAN

A. Profil Pendidikan Pengawas Madrasah

Ditinjau dari latar belakang pendidikan pengawas, terdapat 32 pengawas (80%) berpendidikan sarjana (S-1) dan 8 pengawas (20%) berpendidikan pascasarjana (S-2). Sedangkan latar belakang bidang ilmu pada jenjang S1 dari para pengawas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Profil Pendidikan Pengawas

No	Bidang Ilmu	Jumlah	%
1	Pendidikan Agama Islam	28	70%
2	Pendidikan Sosial	1	2.50%
3	Bimbingan Konseling	1	2.50%
4	Psikologi Pendidikan	1	2.50%
5	Ushuluddin	1	2.50%
6	Syariah	4	10.00%
7	Ilmu Hukum (PTU)	2	5.00%
8	Tarbiyah	2	5.00%
	Jumlah	40	100%

Berdasarkan tabel 02, tampak 70% pengawas memiliki bidang keilmuan PAI dan sisanya (30 %) memiliki berbagai bidang keilmuan lainnya. Sedangkan dari 8 pengawas yang telah menjalani pendidikan tingkat magister (S-2), terdapat 1 orang mendalami ilmu manajemen pendidikan dan 5 orang mendalami bidang syariah. Sedang dilihat dari pengalaman kerja para pengawas, data penelitian menunjukkan bahwa 16 orang pernah menjadi guru; 14 orang pernah menjadi guru dan kepala madrasah; 1 orang pernah menjadi guru, kepala madrasah dan Kakandepag, 3 orang pernah menjadi guru dan pejabat Kandepag setingkat Kasi (Penamas, Pendais, Kasubag TU), 5 orang mantan pejabat Kandepag/Kanwil setingkat kasi (Pendais, Subbag TU), dan 1 orang mantan kepala KUA.

Dilihat dari diklat yang diikuti oleh para pengawas, mereka yang

sebelumnya menjabat guru dan kepala madrasah pernah memperoleh diklat tentang KBK, KTSP, pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk bidang studi PAI. Hal ini tidak diperoleh para pengawas yang tidak berlatar guru. Data penelitian menunjukkan kelompok ini hanya memperoleh materi sekedarnya tentang kurikulum dan pembelajaran pada saat mengikuti orientasi menjadi calon pengawas. Terkait dengan manajemen madrasah, materi ini dimiliki oleh pengawas yang pernah menjadi kepala madrasah. Di samping itu terdapat 7 orang pengawas yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang supervisi pendidikan, meskipun telah menjadi pengawas lebih dari 3 tahun.

Ditinjau dari masa kerja sebagai pengawas, terdapat 25 orang dengan masa kerja antara 1-5 tahun, 10 orang dengan masa kerja antara 6-10 tahun, 4 orang dengan masa kerja antara 11-

15 tahun, dan 1 orang dengan masa kerja 19 tahun. Sedangkan jumlah madrasah yang menjadi wilayah binaan dari para pengawas mencakup rata-rata 20-30 madrasah.

Dengan demikian, menjadi sulit bagi para pengawas untuk memberikan supervisi terhadap pembelajaran di madrasah, yang mengajarkan seluruh mata pelajaran seperti sekolah umum, meskipun muatan pelajaran yang terkait dengan Agama Islam lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum. Hal ini menjadi lebih sulit bagi pengawas yang tidak pernah menjadi guru atau kepala madrasah. Keterbatasan bidang studi yang dikuasai oleh pengawas juga belum ditunjang dengan diklat yang diikuti. Hal ini menyebabkan para pengawas seringkali ketinggalan informasi terbaru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran. Kalaupun ada informasi yang diberikan, cakupannya sangat terbatas karena diberikan melalui kegiatan orientasi atau sosialisasi dan penyampaian ini seringkali dilakukan setelah kebijakan tersebut dioperasionalkan di madrasah.

B. Proses Supervisi yang Dilakukan Pengawas

Data penelitian menunjukkan hanya 1 orang dari pengawas yang menjadi responden penelitian ini yang

tidak menyusun program supervisi. Beberapa komponen yang disajikan dalam program tersebut terkait dengan program pembelajaran, penerimaan siswa baru, administrasi kesiswaan dan sarana prasana madrasah.

Seluruh responden menyatakan bahwa mereka melakukan supervisi terhadap rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru. Terhadap kekurangan produk guru tersebut, saran-saran yang diberikan pengawas ada bersifat langsung/operasional sehingga dapat digunakan guru untuk memperbaiki, tetapi lebih banyak saran-saran yang belum operasional seperti mendorong para guru untuk berkonsultasi melalui forum MGMP, bertanya pada pakar dan mencari sumber-sumber lain yang bisa membantu. Data penelitian juga menunjukkan adanya 4 responden yang memberikan masukan atau bimbingan kepada guru terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran.

Data penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden pernah melakukan supervisi dengan mengadakan kunjungan kelas. Aktivitas supervisi dilakukan dengan memantau kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada RPP yang dibuat guru. Temuan yang diperoleh para pengawas antara lain: rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, dominasi guru

dalam kegiatan pembelajaran serta metoda yang belum bervariasi. Supervisi juga dilakukan terhadap ketersediaan dan pemanfaatan alat dan media pembelajaran, serta perpustakaan. Temuan supervisi yang diperoleh dari pengawas antara lain: belum adanya perpustakaan di sebagian madrasah, terbatasnya alat, media dan koleksi buku di perpustakaan dan belum optimalnya pemanfaatan sarana yang ada baik oleh guru maupun siswa.

Data penelitian menunjukkan 50% responden tidak melakukan supervisi laboratorium dan 25% tidak melakukan supervisi terhadap kegiatan bimbingan dan konseling (BK). Alasan tidak dilakukan supervisi laboratorium adalah tidak tersedianya laboratorium di madrasah dan terbatasnya pengetahuan pengawas tentang laboratorium. Hal yang serupa juga pada program BK, yakni tidak tersedianya program BK dan guru BK di madrasah serta pengetahuan pengawas teknis tentang BK yang terbatas. Hal ini dapat dipahami karena latar belakang pendidikan para pengawas dominan PAI dan mereka tidak memperoleh diklat tentang dua hal tersebut, yaitu laboratorium dan BK.

Pengawas juga melakukan supervisi terhadap penilaian serta disiplin guru dan siswa. Dalam hal penilaian, beberapa temuan yang diperoleh

pengawas antara lain: belum ada keseragaman dalam penilaian, penilaian yang bersifat fiktif, relatif rendahnya penguasaan guru dalam teknis penilaian seperti penyusunan kisi dan pembuatan butir soal. Sedangkan dari aspek disiplin, pengawas menemukan tingkat disiplin guru dan siswa relatif tinggi. Pelanggaran yang terjadi lebih banyak pada ketepatan waktu kehadiran di madrasah/kelas karena alasan-alasan transportasi, terutama para guru yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi madrasah atau karena mengajar di tempat lain. Sedangkan pada siswa, pelanggaran disiplin banyak terjadi pada penggunaan pakaian.

C. Penilaian Kepala Madrasah terhadap Kegiatan Supervisi Pengawas Madrasah

Responden/informan dari kepala madrasah dalam penelitian ini terdiri dari 28 orang kepala MI dan 28 orang kepala MTs. Latar belakang pendidikan para kepala madrasah yang menjadi responden adalah: 1 orang lulusan Diploma III, 47 orang lulusan S-1, 8 orang lulusan S-2. Dari latar belakang keilmuan, 64% responden berasal dari jurusan PAI, sedangkan lain bervariasi, antara lain dari jurusan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Manajemen Pendidikan, BK, Matematik, dan jurusan Tafsir-Hadist. Sedangkan dari

segi usia, paling muda berusia 30 tahun (2 orang dan tertua berusia 59 tahun (2 orang).

Data penelitian menunjukkan 16 madrasah (28,57%) yang memperoleh informasi kedatangan pengawas, sedangkan lainnya tidak memberikan jadwal kedatangan. Bagi madrasah, kondisi semacam ini tidak efektif karena madrasah tidak dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diberikan supervisi oleh pengawas. Di samping itu proses supervisi tidak optimal karena proses kunjungan tidak disesuaikan dengan aktivitas di madrasah. Dalam kaitannya dengan kehadiran pengawas, 44,64% menyatakan mengeluarkan dana untuk kepentingan kegiatan supervisi di sekolah.

Kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas lebih banyak dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen seperti: RPP, bahan ajar, ketersediaan sarana fisik seperti buku, alat dan media pembelajaran serta bertanya kepada kepala madrasah. Data penelitian menunjukkan hanya 12 orang (21,43%) yang melakukan kunjungan kelas pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Terhadap aktivitas supervisi yang dilakukan pengawas, tidak banyak hal yang dapat ditindaklanjuti madrasah untuk perbaikan oleh karena

masukannya yang diberikan bersifat sangat umum dan lebih diarahkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan administratif. Di samping itu saran-saran yang bersifat penambahan fisik seperti pengadaan buku, alat dan media pembelajaran serta perbaikan ruang, sulit dilaksanakan madrasah karena keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki madrasah. Informasi yang diperoleh dari kepala madrasah menunjukkan bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan para pengawas masih bersifat administratif dan belum menyentuh hal-hal mendasar proses pembelajaran sehingga kegiatan supervisi klinis relatif tidak terjadi di madrasah.

D. Penilaian Guru Terhadap Kegiatan Supervisi Pengawas Madrasah

Responden/informan dari guru madrasah dalam penelitian ini terdiri dari 56 orang guru MI dan 56 orang guru MTs. Latar belakang pendidikan para kepala madrasah yang menjadi responden adalah: lulusan Diploma, S-1, lulusan S-2. Dari latar belakang keilmuan, responden bervariasi, antara lain dari jurusan PAI maupun mata pelajaran umum. Sedangkan dari segi usia, paling muda berusia 24 tahun dan tertua berusia 55 tahun.

Secara umum penilaian guru terhadap aktivitas supervisi yang dilakukan pengawas relatif sama dengan

penilaian kepala sekolah. Begitu pula terkait dengan masukan yang diberikan oleh pengawas terhadap apa yang dikerjakan guru lebih banyak saran yang bersifat umum dan kurang memberi bimbingan atau contoh secara teknis, misalnya bagaimana cara mengajar yang efektif, bagaimana membuat soal yang sesuai dengan tujuan penilaian serta memotivasi siswa agar bersemangat belajar di dalam kelas. Secara khusus, guru yang lebih banyak menerima manfaat dari proses supervisi ini adalah guru mata pelajaran dalam rumpun agama Islam, karena sebagian pengawas memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman sebagai guru rumpun Agama Islam di Madrasah.

III. ANALISIS

Pembelajaran di madrasah menggambarkan adanya interaksi yang berlangsung sesuai dengan perencanaan pembelajaran dan dilaksanakan secara terkontrol agar hasil proses pembelajaran yang terjadi secara efektif dan efisien sebagaimana yang ditetapkan dalam standar kompetensi. Meskipun disain dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru, namun ada pihak lain yang turut serta menentukan hasil, yaitu pengawas. Pengawas mempunyai andil, dalam memberikan arahan, koreksi atas

perencanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru serta pelaksanaannya di dalam dan di luar kelas. Oleh karena itu, pengawas harus bertindak sebagai partner, konsultan sekaligus sebagai penilai.

Sebagai partner, proses supervisi menunjukkan adanya kesetaraan antara pengawas dengan guru. Dengan demikian pengawas tidak boleh menunjukkan diri sebagai atasan dari guru atau memperlakukan guru sebagai sub-ordinatnya. *Partnership* yang efektif akan terjadi apabila pengawas memahami sifat manusiawi dan kondisi rekan kerjanya. Pemahaman tentang sifat manusiawi artinya pengawas menyadari, bahwa meskipun para kepala madrasah dan guru adalah orang-orang dewasa dan menjadi bagian penting upaya peningkatan kualitas manusia, namun pada saat yang bersamaan juga memiliki keterbatasan. Dalam upaya itu, mereka membutuhkan masukan-masukan dan dukungan dari orang lain yang lebih tinggi pengetahuan atau pengalaman. Dalam konteks inilah maka pengawas madrasah harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dalam aktivitas kerja yang dilakukan oleh guru dan kepala madrasah.

Oleh karena itu, seorang pengawas harus memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi ini tidak saja

mencakup aspek kognitif semata tetapi juga pada aspek sikap dan perilaku yang terkait dengan bidang pekerjaan. Kompetensi tersebut terkait dengan bidang-bidang keguruan, manajerial serta substansi mata pelajaran. Apabila kompetensi yang dimiliki pengawas memadai atau bahkan melebihi kemampuan para guru dan kepala sekolah, maka pengawas dapat memposisikan diri sebagai konsultan. Sebagai konsultan, salahsatu pendekatan penting dalam membantu mengatasi masalah kliennya adalah pendekatan diagnostik. Pendekatan ini menuntut pengawas untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu masalah, bukan sekedar masalah sendiri. Pendekatan diagnostik juga memerlukan kemampuan pengawas untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dialami madrasah yang menjadikan tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran-peran sebagai *partner*, konsultan maupun penilai belum dapat dilakukan pengawas madrasah yang menjadi responden penelitian ini. hal ini disebabkan latar belakang pengetahuan, pengalaman maupun pelatihan yang mereka peroleh tidak relevan dengan pekerjaan mereka sebagai pengawas pembelajaran di madrasah

yang mengajarkan semua mata pelajaran sebagaimana halnya di sekolah umum. Di samping itu, usia para pengawas yang dominan mendekati 60 tahun menjadikan kendala untuk mendorong para pengawas untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri. Implikasinya, guru-guru muda berprestasi di madrasah dan memiliki latar belakang pendidikan mata pelajaran umum diberi peluang untuk menjadi pengawas

Mekanisme pengawasan pembelajaran dinamakan dengan sebutan supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan salah satu sarana pengembangan dan koreksi atas pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk peningkatan profesional guru. Pentingnya supervisi klinis bukan hanya sebagai kegiatan terapis pembelajaran, tetapi juga kebutuhan praktis yang berkaitan dengan pengalaman lapangan dan pengalaman klasikal agar menjadi saling melengkapi. Lebih lanjut supervisi klinis merupakan upaya memberikan masukan membangun (*feedback*) untuk memastikan bahwa seluruh aspek pedagogik tercakup dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa.

Suasana yang terbangun dalam proses supervisi klinis adalah kepercayaan yang penuh antar pihak yang

mencerminkan kesepahaman, saling mendukung, komitmen bersama serta guru tidak merasa terkontrol. Dengan demikian pendekatan birokratis harus dihilangkan –sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh para pengawas yang mantan pejabat. Hubungan profesional antara guru-supervisor harus terbangun agar tidak terjadi suasana saling mencurigai, mengingat setiap kegiatan supervisi klinis akan selalu terjadi intervensi dalam pembelajaran. Proses supervisi klinis mensyaratkan supervisor menguasai landasan pendidikan khusus didaktik-metodik dan materi dari suatu bidang studi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para pengawas telah melaksanakan kegiatan supervisi bidang pembelajaran, namun saran-saran perbaikan yang diberikan masih bersifat umum dan belum dapat dijadikan bahan perbaikan langsung oleh para guru atau kepala madrasah. Sementara itu tidak optimalnya supervisi laboratorium dan program BK disebabkan ketiadaan sarana, program atau personalia madrasah yang menanganinya.
2. Menurut kepala madrasah dan guru, hanya sebagian kecil pengawas yang menginformasikan

jadwal kunjungannya ke madrasah.

3. Kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas lebih banyak bersifat administratif dan belum sampai pada model supervisi klinis yang merupakan mekanisme supervisi kegiatan pembelajaran.

B. Saran

1. Syarat untuk pengawas bidang pembelajaran harus berpengalaman sebagai guru dan atau kepala madrasah dan diupayakan mereka berlatar belakang guru mata pelajaran non PAI.
2. Diminimalisasi jabatan fungsional pengawas sebagai perpanjangan masa kerja sebagai pegawai negeri, terutama bagi mereka yang menjabat struktural dari Kanwil/Kandepag.
3. Diberi peluang guru/kepala madrasah yang berusia muda (40-50 th) untuk menjadi pengawas.
4. Penyampaian informasi kepada pengawas tentang kebijakan baru dalam pendidikan khususnya terkait kurikulum dan pembelajaran hendaknya dilakukan dalam bentuk diklat teknis dan bukan sekedar orientasi atau sosialisasi dalam jam pelatihan yang minim. Akan lebih efektif apabila informasi tersebut

diketahui lebih dahulu oleh pengawas dibandingkan personalia madrasah.

SUMBER BACAAN

- Bafadal, Ibrahim (1992): *Supervisi Pengajaran: Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- DL Goetsch dan Davis (1994): *Introduction to Total Quality: Quality, Productivity and Competitiveness*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Depdikbud (1998): *Keputusan Menpan No. 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Harrington (1994): *Total Quality Management: the Key to Business Improvement*. London: Chapman and Hall.
- Hadley Beare, Brian J. Caldwell dan Ross H. Milikan (1989): *Creating an Excellent School: Some New Management Techniques*. New York: Routledge.
- Heichnich et al. (1996): *Instructional Media and Technologies for Learning*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard (1998) *Managing of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
- Irawan, Handi (2002): *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Jaelani, Kadir HA (2003): *Upaya Memberdayakan Tenaga Teknis pendidikan Agama Islam dalam Departemen Agama, Profesionalisme Pengawas Pendaia, Profesionalisme Pengawas Pendaia*. Jakarta: Dep. Agama RI, Ditjen Binbaga
- Kerlinger, Fred N (1990): *Asas-asas Penelitian Behavioral*. terjemahan Landung R. Simatupang. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Mondy, R. Wayne dan Shane R (1993): *Premeaux, Management: Concepts, Practices, and Skills*. Boston: Allyn and Bacon.
- O'Donnel, James S.J (1995) *For the Chosen: A Guide to Classroom Supervision*. Manila: Cahco Publishing House.
- Patron, Carl V. dan David S. Sawicki (1986): *Basic Method of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sagala, Syaiful (2005): *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, Edward (1993): *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.
- Sergiovanni, Thomas J. dan Robert J. Starrat (1993): *Supervision: A Redefinition*. New York: McGraw-hill.
- Sevilla et al. (1998): *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI-Press.
- Sudjana, Nana dan R. Ibrahim (1993): *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Supriadi, Dedi (2003): *Membangun Perspektif Inklusif dalam Penelitian Pendidikan*. Makalah diskusi dengan mahasiswa S3 PPs UNJ, 6 Pebruari
- Tim Ditjen Baga Islam (2003): *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama*. Jakarta: Ditjen Baga Islam.